

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-157/BC/2023

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN  
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)  
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE FEDERAL  
AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF  
THE UNITED ARAB EMIRATES*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) telah ditandatangani Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab Emirates*;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditandatangani Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab Emirates*;
  - c. bahwa telah dilakukan uji coba Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab Emirates*;
  - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kedua belah pihak bersepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara penuh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab Emirates*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1922);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES*.

KESATU : Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) dan Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan *The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab Emirates* (ICP, UAE) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat beserta Catatan Penjelasannya antara DJBC dengan ICP, UAE sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU khususnya mengenai pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses *customs clearance* yang berupa penurunan tingkat risiko sebesar 20% pada *risk engine* reguler dalam manajemen risiko penjaluran impor.

KETIGA : Fasilitas perdagangan sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

- barang impor berasal dari pelabuhan muat di Uni Emirat Arab;
- menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (*AEO Trader Identification Number*) dan tanggal otorisasi (*authorization date*) perusahaan AEO Uni Emirat Arab; dan
- merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

- KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan penerapan secara penuh (*mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2023.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2023

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

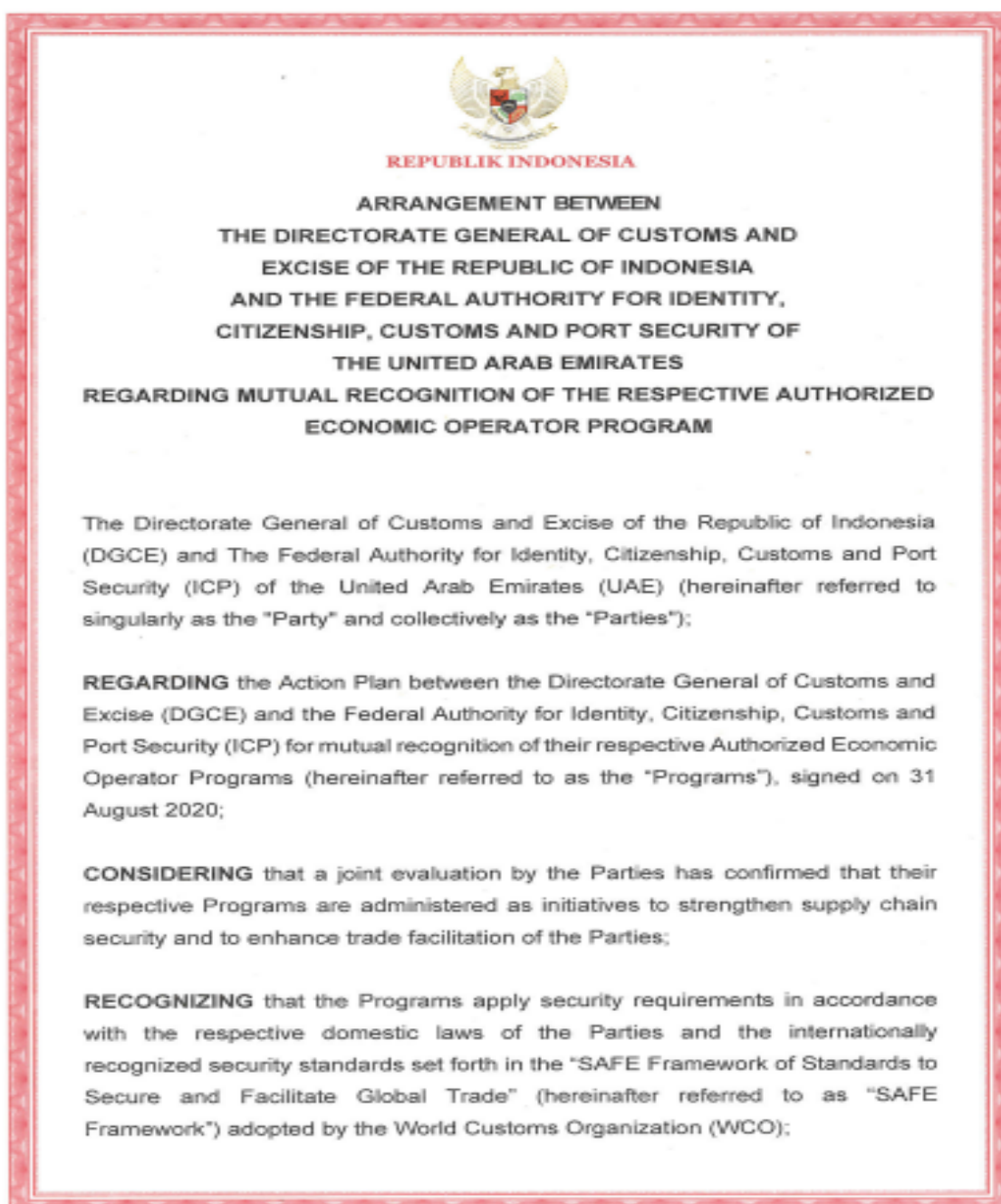


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH  
(MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN  
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI  
BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION  
ARRANGEMENT AUTHORIZED ECONOMIC  
OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI DENGAN *THE FEDERAL  
AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,  
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED  
ARAB EMIRATES*.

NOMOR : KEP-157/BC/2023

TANGGAL : 10 November 2023

- A. KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI  
BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DENGAN *THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,  
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES*.



**ACKNOWLEDGING** the specialized nature of each Party's border management processes, procedures, mechanisms and the legislations adopted by the Parties in administering their respective Programs;

**HAVING REGARDS** to the Agreement on Co-operation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters, which was signed by the two Governments of the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on 24 July 2019 in Indonesia, which promoted cooperation to facilitate and secure trade; and

**UNDERSTANDING** that the mutual recognition of the Programs and other related measures between the Parties not only contributes greatly to the supply chain security but also facilitates legitimate trade;

Have reached the following understanding:

#### **Article 1**

##### **Responsible Parties and Scope**

1. The Parties will be the responsible entities for the implementation of this Arrangement.
2. This Arrangement will exclusively be concerned with the mutual recognition of the respective Programs administered by such Parties.

#### **Article 2**

##### **Compatibility**

The Parties will ensure that:

- (a) the standards applied to the respective Programs will be compatible in the following aspects:
  - (i) accreditation criteria;
  - (ii) application procedures;
  - (iii) validation processes;

- (iv) approval mechanism; and
  - (v) management of AEO status.
- (b) their respective Programs will operate in accordance with the principles and standards of the SAFE Framework.

### **Article 3**

#### **Mutual Recognition and Benefits**

1. Each Party intends to accept the validation results and AEO status granted to Authorized Economic Operators (hereinafter referred to as "AEOs") of the other Party's Program.
2. Each Party agrees to provide the Authorized Economic Operators, duly accredited by the other Party under its Program, in accordance with the respective domestic laws and customs procedure, with the following trade facilitation measures:
  - (a) reduced customs import inspection rates;
  - (b) simplified verification of import-related documents;
  - (c) faster clearance of import cargo;
  - (d) prioritized measures to respond to disruptions in trade flows due to increases in security alert levels, border closures and/or natural disasters, hazardous emergencies or other major incidents; and
  - (e) Designated customs officials in charge of communication in order to handle issues relating to clearance of goods of AEOs under the respective Programs.
3. Each Party will take into consideration the status of AEOs accorded by the other Party under its Program when conducting risk assessment on importing goods from those AEOs.
4. Each Party may, under reasonable circumstances, suspend any or all the facilitation measures given to one or more AEOs of the other Party, provided that the other Party has been promptly notified of this decision and the underlying reasons.

**Article 4**  
**Information Exchange and Communication**

1. The Parties will agree upon information exchange and mutual communication as follows:
  - (a) regularly exchanging up-to-date information on authorized companies under their respective Programs in a mutually determined manner; such information will include the names, addresses, unique identifiers, AEO status, and other relevant information;
  - (b) providing updates on the operation of and changes to their respective Programs; and
  - (c) exchanging information obtained from authorized companies regarding the implementation of this Arrangement.
2. The Parties will abide by respective domestic laws and regulations to exchange information.
3. The Parties will keep the information received from the other Party confidential, and the information will be used solely for the purpose of implementing this Arrangement. The received information may be disclosed to a third party only with the written consent of the other Party.

**Article 5**  
**Future Endeavors**

The Parties will agree to:

- (a) actively implement this Arrangement with a view to strengthening the supply chain security of the Parties and enhancing their common interest on trade facilitation, and may meet when needed in order to analyze the implementation of this Arrangement;
- (b) share details of benefits provided to the AEO of the other Party in implementing this Arrangement between both Parties;
- (c) pursue in providing the AEOs of the other Party with further trade facilitation measures in accordance with this Arrangement, and to the extent possible, in cooperation with other government agencies; and

- (d) seeking ways of exchanging information and related data through electronic means for the purpose of this Arrangement.

#### **Article 6**

##### **Consultation and Amendment**

1. All issues relating to the interpretation or implementation of this Arrangement will be resolved through mutual consultation of both Parties.
2. Amendment of this Arrangement will be subject to written agreement between both Parties.

#### **Article 7**

##### **Status of Arrangement**

1. This Arrangement does not intend to create any legal rights and obligations binding under international law or the law of any other jurisdiction, nor does it confer or create any rights, privileges or benefits on any third person or party.
2. The Parties will implement the measures under this Arrangement in accordance with their respective domestic laws and regulations, as well as applicable international agreements to which the respective Parties are a party of.
3. No provision in this Arrangement will restrict either Party from acting in accordance with the provisions of the applicable international treaties and agreements, or its domestic laws, regulations and practices.

#### **Article 8**

##### **Commencement and Termination**

1. This Arrangement shall come into effect upon signature by both Parties, provided that Article 3.2 will come into effect on a date mutually agreed on by the Parties and no later than 12 months of the signing of the Arrangement.
2. Either Party may discontinue or terminate this Arrangement by providing the



other Party with a written notification at least thirty (30) days in advance of the intended date of discontinuation or termination.

Signed in Jakarta and Abu Dhabi on 11 November 2022, in two original copies in the English, Indonesian, and Arabic languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.


**For The Directorate General of  
Customs and Excise  
of The Republic of Indonesia**



**ASKOLANI**

**DIRECTOR GENERAL**

**For The Federal Authority for  
Identity, Citizenship, Customs and  
Port Security  
of The United Arab Emirates**



**AHMAD ABDULLA BIN LAHEJ**

**AL FALASI**

**CUSTOMS DIRECTOR GENERAL**

- B. CATATAN PENJELASAN (*EXPLANATORY NOTES*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES*.

**EXPLANATORY NOTES FOR THE ARRANGEMENT BETWEEN  
THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,  
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF  
THE UNITED ARAB EMIRATES  
REGARDING MUTUAL RECOGNITION OF THE RESPECTIVE AUTHORIZED  
ECONOMIC OPERATOR PROGRAMS**

**1. Background and Purpose**

The purpose of this Explanatory Notes is to facilitate the implementation of the Arrangement between the Directorate General of Customs and Excise of the Republic of Indonesia (DGCE) and the Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs And Port Security of the United Arab Emirates (ICP) (and hereinafter referred to separately as "Party" and jointly as "Parties") regarding Mutual Recognition of the respective Authorized Economic Operator Programs and to clarify details of articles of the Arrangement which was signed on 11 November 2022 in Jakarta and Abu Dhabi.

**2. Information Exchange**

To ensure an effective implementation of the Arrangement, both Parties exchange updated information of Authorized Economic Operators (AEOs) in the following manner.

**2.1 Details of Information**

Both Parties provide the following information in an MS Excel format:

- (a) Identification code (the unique number given to an AEO in order to provide facilitation measures under the Arrangement);
- (b) Name of AEO;
- (c) Address (including all premises);
- (d) Authorization date;
- (e) Validity period;
- (f) Status (marking those valid in black, and marking those that are suspended, canceled or changed in red.)
- (g) Remarks (record major changes for information of the other Party); and
- (h) Types of authorized entity.

## **2.2 Frequency and Channel for Information Exchange**

Each Party, according to the Arrangement, provides information as referred to Article 2.1 to the other Party via the latter's designated electronic mailbox no later than the first 5 working days of each month, or whenever there are any changes to the information. If the information for the current month is the same as that of last month, a "No change" message should be sent to the other Party.

In case a Party suspends or revokes an AEO status under their AEO Program, they shall promptly notify the other Party of such change.

## **2.3 Protection of Information**

To enhance security of the AEO information, each Party encodes the AEO list with a password before sending it to the other Party. The password should be 10 digits or more, containing capital and small letters and numbers, without any pattern. Each Party could send the password to the designated electronic mailbox of the other Party when an acknowledgment is received from the same within 24 hours after sending the list.

### **3. Identification of AEOs of the other Party**

To ensure trade facilitation measures are provided under the Arrangement, each Party should promptly and effectively identify whether goods are imported from AEOs of the other Party.

#### **3.1 United Arab Emirates to Identify the Republic of Indonesia AEOs**

The Republic of Indonesia AEO Company should notify its identification code to its UAE importer when exporting to UAE. Its UAE importer should specify Republic of Indonesia Company Identification Code while performing importer declaration.

UAE Customs compares the Republic of Indonesia Company Identification Code with the information provided in accordance with Article 2 of this Explanatory Notes and, therefore, if the two are matched, the UAE Customs could provide facilitation measures.

#### **3.2 Republic of Indonesia to Identify United Arab Emirates AEOs**

The United Arab Emirates AEO Company should notify its identification code to its Indonesian importer when exporting to Indonesia. The Indonesian importer should state the United Arab Emirates AEO identification code while performing import declaration.

DGCE compares such identification code with the information provided, which has been recorded in Customs & Excise Information System and Automation, in accordance with Article 2 of this Explanatory Notes; and, thereafter, if the two are matched, the DGCE provides trade facilitation measures.

#### 4. Details of Trade Facilitation Measures

- (a) *Reduced customs import inspection rates:* Each Party recognizes the AEO status of exporters of the other Party at the stage of import declaration, and reduces the rate of inspection for the goods concerned during risk assessment by the Customs.
- (b) *Simplified verification of import-related documents:* Each Party simplifies clearance procedures of an AEO from the other Party, and handles its documentary validation at the same level with that of a domestic authorized companies and in accordance with the national AEO procedures relating to such verification.
- (c) *Faster clearance of import cargo:* Each Party guarantees prioritized clearance in terms of inspection or documentary validation for importing goods of AEOs of the other Party.
- (d) *Prioritized measures:* Each Party responds to disruptions in trade flow due to increases in security alert levels, border closures and/or natural disasters, hazardous emergencies or other major incidents.
- (e) *Designated customs officials:* Each Party appoints one or more customs liaison officers from its headquarters. When an AEO of one Party reports any problem raised during import clearance in the territory of the other Party, the liaison officer who receives the report notifies it to the liaison officer of the other Party. The liaison officer of the importing country does its best to resolve the problem, and informs the other Party of the results.

## **5. Suspension and Exclusion of Trade Facilitation Measures**

### **5.1 Reasonable Grounds for Suspension and Exclusion**

Each Party has the discretion, under reasonable grounds, to suspend or to exclude provisions of trade facilitation measures to AEOs of the other Party taking into consideration its domestic regulations and measures including but not limited to cargo clearance, risk assessment of local companies and intelligence.

Reasonable grounds to suspend or to exclude trade facilitation measures provided to AEOs of the other Party under the Arrangement may include:

- (a) information of AEOs of the other Party being misused or abused; or
- (b) any illegal activities conducted by AEOs of the other Party being detected.

### **5.2 Procedures for Suspension and Exclusion**

In suspending or excluding trade facilitation measures provided to an AEO of the other Party, each Party should promptly notify the other Party of the name of the AEO, the underlying reasons and the date of suspension.

### **5.3 Resumption of Trade Facilitation Measures**

Each Party resumes providing trade facilitation measures to the suspended AEOs under the Arrangement immediately after the grounds for the suspension are no longer valid. Each Party should promptly notify the resumption to the other Party.

In case the approval status of the suspended AEO is revoked, the other Party should be promptly notified in accordance with the information exchange mechanism under Article 2.

#### **6. Check and Assessment of Implementing the Arrangement**

Both Parties exchange statistics data related to the trade facilitation measures under the Arrangement on an annual basis via electronic mailbox or at a review meeting, and the types of exchanged statistics are as follows:

- (a) the number of importation and the inspection rate of imported cargo from AEOs and non-AEOs, respectively of the other Party; and
- (b) clearance lead time of AEOs and non-AEOs.

The Parties may hold meetings when needed to assess whether the Arrangement is well implemented.

#### **7. Pilot Implementation**

Prior to commencement of the Arrangement, both Parties shall jointly conduct a pilot implementation to test the related mechanism for exchange of information and address any problems in advance which may possibly occur upon implementation of the Arrangement.

The pilot implementation shall last for a period of three months followed by a one-month review period on the basis of the results and statistics of the pilot implementation in order to decide on the exact date of commencement of full implementation of the Arrangement.

Subsequent to conducting the pilot implementation, both Parties shall fully implement the Arrangement on a mutually agreed upon date no later than 12 months after the signing of the Arrangement.

### **8. Commencement and Amendment**

This Explanatory Notes shall come into effect upon signing by both Parties.

Amendment of this Explanatory Notes, where necessary, may be discussed in the review meeting in accordance with Article 6.

Signed on the 11 November 2022, in duplicate in the English language.

**For the Federal Authority for  
Identity, Citizenship, Customs  
and Port Security of the United  
Arab Emirates**



**SUOUD SALEM ALAGROOBI  
DIRECTOR OF  
INTERNATIONAL RELATIONS**

**For the Directorate General of  
Customs and Excise of the  
Republic of Indonesia**



**ANITA ISKANDAR  
DIRECTOR OF  
INTERNATIONAL AFFAIRS**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH  
(MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN  
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI  
BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION  
ARRANGEMENT AUTHORIZED ECONOMIC  
OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI DENGAN *THE FEDERAL  
AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,  
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED  
ARAB EMIRATES*.

NOMOR : KEP-157/BC/2023

TANGGAL : 10 November 2023

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES* (ICP, UAE)

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

- a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari pihak ICP, UAE, selanjutnya:
  - 1) Menyampaikan daftar perusahaan AEO ICP, UAE dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara:
    - a) manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodir form daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau
    - b) memutakhirkan daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam hal sistem komputer pelayanan telah mengakomodir form daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya; dan/atau
  - 2) Menyampaikan informasi berupa *update* program AEO dan informasi terkait lainnya dari pihak ICP, UAE kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;
- b. Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak ICP, UAE;

- c. Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak ICP, UAE;
  - d. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
  - e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
- a. Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodir form daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya atau mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan pemutakhiran data pada sistem komputer pelayanan;
  - b. Memutakhirkan Sistem Analisis Risiko Importasi dalam rangka pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;
  - c. Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan pada sistem komputer pelayanan;
  - d. Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;
  - e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau
  - f. Memberikan bimbingan teknis.
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
- a. Menerima informasi perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis; dan/atau
  - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
4. Direktur Teknis Kepabeanan
- a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;
  - b. Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka pelaksanaan.
  - c. Menyampaikan hasil evaluasi atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai; dan/atau

- d. Memberikan bimbingan teknis;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    - a. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
    - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
    - a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi; dan/atau
    - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
  7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
    - a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi; dan/atau
    - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.